

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KOTA BANJARBARU NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA
ROKOK TERHADAP PENEGAKAN PARA PEROKOK
DI KOTA BANJARBARU**

Muhammad Aqsal¹, Afif Khalid², Muthia Septarina³

Hukum, 60202, Studi Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari
Banjarmasin, 18810232

Hukum, 60202, Studi Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari
Banjarmasin, 1126108202

Hukum, 60202, Studi Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari
Banjarmasin, 061610314

Email : mhmdaqsal.ip6@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan terhadap dua rumusan masalah yakni (1) Bagaimana penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok terhadap penegakan para perokok di Kota Banjarbaru, (2) Apa saja kendala penerapan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok terhadap penegakan para perokok di Kota Banjarbaru. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang bersifat kualitatif. Sampel penelitian adalah pejabat yang berkompeten memberikan informasi terhadap kebijakan peraturan daerah KTR. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa dalam penerapan kendala yang Dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu masih kurangnya jumlah pegawai Satpol PP dan sarana dan prasarana Satpol PP juga masih kurang dan hambatan dari Eksternal Satpol PP yaitu masyarakat kurang mengetahui perda kawasan tanpa rokok dan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan selain itu masih banyak instansi pemerintah yang belum memiliki *Smoking Room*.

Kata Kunci : Peraturan Daerah, Kawasan Tanpa Rokok

ABSTRACT

This research is focused on two problem formulations, namely (1) How is the application of the Banjarbaru City Regional Regulation Number 12 of 2017 concerning Non-Smoking Areas to the enforcement of smokers in the Banjarbaru City, (2) What are the obstacles to the application of the Banjarbaru City Regional Regulation Number 12 of 2017 concerning the Area No Smoking on the enforcement of smokers in Banjarbaru City. This research is an empirical legal research, which is qualitative in nature. The research sample is officials who are competent in providing information on KTR regional regulations. Data collection techniques used in this study include interviews and documentation. From this study, it was found that in implementing the obstacles faced by the Civil Service Police Unit in Enforcement of Banjarbaru City Regulation Number 12 of 2017 concerning Non-Smoking Areas, namely the lack of Satpol PP employees and Satpol PP facilities and infrastructure are also still lacking and obstacles from External Satpol PP, that is, the public is not aware of the local regulations on non-smoking areas and there is still a lack of public awareness to comply with the rules. Besides that, there are still many government agencies that do not yet have a smoking room.

Keywords: Regional Regulation, No Smoking Area

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Hamzah Halim, Kemal Redindo Syahrul Putera. 2009. *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah*. Kencana. Jakarta.

Harbani Pasolong. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung.

Hetti. 2009. *Pernapasan Pada Manusia dan Hubungannya dengan Kesehatan*. Puri Delco. Bandung.

Kartasapoetra, Misdayanti. 1993. *Fungsi pemerintahan daerah dalam pembuatan peraturan daerah*. Bumi Aksara. Jakarta.

Sarman, Muhammad Taufik Makarao. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.

Sri Sisati. 2013. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Rajawali Pers. Jakarta. Tim Direktorat Fasilitas Perancangan

Perda. 2009. *Panduan Praktis memahami Perancangan Peraturan 131 Daerah*. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM RI. Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Bahan Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah